



BADAN ANGGARAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

PENGADILAN NEGERI MENTOK

PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
BAGIAN ANGGARAN 005.03.402021



📍 Kompleks Perkantoran Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Desa Belo Laut Kecamatan Mentok
Kabupaten Bangka Barat
Provinsi Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Negeri Mentok adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Mentok (402021) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Mentok. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mentok, 30 Juni 2026
Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M. 
NIP. 198509252009042005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional.....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	15
A. Penjelasan Umum.....	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Mentok.....	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4. Basis Akuntansi	19
A.5. Dasar Pengukuran	19
A.6. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	27
B.2. Belanja	29
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
C.1. Aset Lancar	34
C.2. Aset Tetap.....	36
C.3. Aset Lainnya.....	40
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	42
C.5. Uang Muka dari KPPN.....	43
C.6. Ekuitas	43
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43
D.2. Beban Pegawai	44
D.3. Beban Persediaan	45
D.4. Beban Barang dan Jasa	45
D.5. Beban Pemeliharaan.....	46
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	47
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47

D.9.	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	48
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
E.1.	Ekuitas Awal.....	49
E.2.	Surplus/(Defisit)-LO	49
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset	49
E.4.	Koreksi Nilai Persediaan	49
E.5.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	50
E.6.	Transaksi Antar Entitas	50
E.7.	Ekuitas Akhir	50
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	51
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	51
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	51
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	54

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	1
Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2026 dan Per 31 Desember 2025	2
Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	24
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	25
Tabel 5. Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi Per 30 Juni 2026.....	27
Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB Per 30 Juni 2026	27
Tabel 7. Perbandingan Realisasi PNPB Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025	28
Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026	29
Tabel 9. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026	29
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025	30
Tabel 11. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	30
Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	31
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	32
Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	33
Tabel 16. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 ...	34
Tabel 17. Rincian Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	34
Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	35
Tabel 19. Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	36
Tabel 20. Rincian Persediaan Belum Diregister 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	36
Tabel 21. Rincian Aset Tetap	37
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah.....	37
Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	40
Tabel 24. Rincian Aset Lainnya	40
Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya	42
Tabel 26. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	42
Tabel 27. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	43
Tabel 28. Rincian Realisasi PNPB Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	43
Tabel 29. Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	44
Tabel 30. Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 31. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	45
Tabel 32. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	46
Tabel 33. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	47
Tabel 34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	47
Tabel 35. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025	48
Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	48
Tabel 37. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 30 Juni 2026	49
Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas.....	50

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dusun IV Daya Baru, Desa Belo Laut,
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351 www.pn-mentok.go.id,
pn.mentok@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Mentok (402021) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Mentok (402021) telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mentok, 30 Juni 2026

Sekretaris

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



 **SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M.** 
NIP. 198509252009042005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2026 sebagaimana telah diubah dengan 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Mentok (402021) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan negara dan hibah, belanja, pembiayaan selama periode 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.957.000,- atau mencapai 62.00% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.789.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp53.128.000,- atau mencapai 49.00% dari alokasi anggaran sebesar Rp109.112.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
--------	--------------	--------------

	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Selisih
Pendapatan Negara	4.789.000	2.957.000	62.00	1.832.000
& Hibah				
Belanja Negara	109.112.000	53.128.000	49.00	55.984.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp187.317.220,- yang terdiri dari: Aset Lancar berupa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.000.000,-; Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp177.984.220,- dan Persediaan sebesar Rp1.333.000.

Kewajiban Jangka Pendek berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp177.984.220,-; dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp8.000.000,-.

Nilai Ekuitas Per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.333.000,-.

Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2026 dan Per 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Rp.	%
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.000.000	0	8.000.000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	177.984.220	0	177.984.220	0.00
Persediaan	1.333.000	5.070.000	(3.737.000)	(73.71)
Jumlah Aset Lancar	187.317.220	5.070.000	182.247.220	3,594.62
Jumlah Aset	187.317.220	5.070.000	182.247.220	3,594.62
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Ketiga	177.984.220	0	177.984.220	0.00
Uang Muka dari KPPN	8.000.000	0	8.000.000	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	185.984.220	0	185.984.220	100.00
Jumlah Kewajiban	185.984.220	0	185.984.220	100.00
Ekuitas				
Ekuitas	1.333.000	5.070.000	3.737.000	(73.71)
Jumlah Ekuitas	1.333.000	5.070.000	3.737.000	(73.71)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban-LO, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya, surplus/(defisit) dari pos luar biasa dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.957.000,- sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp55.198.046,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp58.155.046,-). Untuk Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset sebesar Rp0,-, Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp0,-, Beban Pelepasan Aset sebesar Rp0,-, Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,-, Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,-, Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,-, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,- yaitu terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,- dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,- sehingga Jumlah Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa menjadi sebesar (Rp55.198.046,-). Kemudian POS Luar Biasa dan Beban Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO secara keseluruhan sebesar (55.198.046,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada Tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.070.000,- dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp55.198.046,-) kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,-; Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,-; Koreksi atas Reklasifikasi sebesar Rp0,-; Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp0,-; Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp0,- dan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp0,-, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp51.461.046,- sehingga terdapat kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar (Rp3.737.320,-) dan Ekuitas akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.333.000,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan Tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode Per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MENTOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2026 dan
PER 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	30 Juni 2026				30 Juni 2025
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.789.000	2.957.000	(1.832.000)	62.00	1.702.000
2	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	4.789.000	2.957.000	(1.832.000)	62.00	1.702.000
B.	Belanja Negara					
1.	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	109.112.000	53.128.000	(55.984.00)	49.00	50.945.770
3.	Belanja Modal	0	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara	109.112.000	53.128.000	(55.984.00)	49.00	50.945.770

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Mentok, 30 Juni 2026

Sekretaris Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M. 
NIP. 198509252009042005

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MENTOK
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	31 DESEMBER 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	8.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1 2.	177.984.220	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1. 4.	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1. 5.	0	0
Persediaan	C.1 6.	1.333.000	5.070.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.1 7.	0	0
Jumlah Aset Lancar		187.317.220	5.070.000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2 3.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 4.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 5.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0

KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	177.984.220	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	8.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		185.984.220	0
Jumlah Kewajiban		185.984.220	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		
Jumlah Ekuitas Dana		1.333.000	5.070.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		1.333.000	5.070.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Mentok, 30 Juni 2026

Sekretaris Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M. *du*
NIP. 198509252009042005

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MENTOK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			
425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		0	0
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		90.000	260.000
425233 Pendapatan Ongkos Perkara		530.000	390.000
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		2.337.000	1.052.000
Jumlah Pendapatan	D. 1	2.957.000	1.702.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	18.570.046	26.347.596
Beban Barang dan Jasa	D. 4	39.210.000	30.278.770
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	375.000	750.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 8	0	0
Jumlah Beban Operasional		58.155.046	57.376.366
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	D. 9	(55.198.046)	(55.674.366)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 10	0	0
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(55.198.046)	(55.674.366)
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa	D. 11	0	0
Surplus/(Defisit) – LO	D. 12	(55.198.046)	(55.674.366)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Mentok, 30 Juni 2026

Sekretaris Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,

 SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M. 
NIP. 198509252009042005

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MENTOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 dan 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E.1	5.070.000	4.602.000
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	E.2	(55.198.046)	(55.674.366)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar			
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 6	51.461.046	52.451.366
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(3.737.000)	(3.223.000)
Ekuitas Akhir	E. 7	1.333.000	1.379.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Mentok, 30 Juni 2026
Sekretaris Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,

SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt., M.M.
NIP. 198509252009042005

A horizontal decorative bar at the top of the page, consisting of a blue square on the left and a black rectangle on the right.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan yang Berada Dibawahnya;

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Mentok

Pengadilan Negeri Mentok merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi: "Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama dan tugas lain yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum".

Pengadilan Negeri Mentok dibentuk pada tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Mentok, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 208/KMA/SK/X/2018 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Mentok. Pengadilan Negeri Mentok memiliki wilayah hukum meliputi 6 (enam) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Kelapa, Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Mentok adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama yang dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Visi Pengadilan Negeri Mentok adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Mentok menjadi lembaga yang dihormati, sebagaimana moto Pengadilan Negeri Mentok yaitu "PACAK" merupakan singkatan dari Profesional, Akuntabel, Cermat, Antusias dan Kredibilitas, dimana di dalamnya dikelola

oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Mentok adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mentok;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Mentok; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Mentok.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Mentok melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut:

Tahap persiapan rencana:

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Mentok ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi:

1. Memelihara kepercayaan masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mentok terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.

- a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Negeri Mentok berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Negeri Mentok akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Mentok berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Negeri Mentok akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Mentok. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis SAKTI dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SAKTI-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Mentok menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Mentok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Mentok adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,-.
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,-.
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa

manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester I	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode Semester I Tahun 2026 berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Mentok telah mengadakan 2 (Dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemuktahiran data POK yang telah disesuaikan dengan realisasi Bulan Januari 2026 s.d Juni 2026, rencana penarikan dana Bulan Januari 2026 s.d Bulan Juni 2026. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan PNBP Lainnya	4.789.000	4.789.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	4.789.000	4.789.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	109.112.000	109.112.000
JUMLAH BELANJA	109.112.000	109.112.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah:
Rp2.957.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.957.000,- atau mencapai 62,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.789.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Mentok adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sebesar Rp4.789.000,-.

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan	0	0	0,00
	Pengesahan Surat di			

Bawah Tangan (425231)			
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	480.000	90.000 19.00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	920.000	530.000 58.00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	3.389.000	2.337.000 69.00
Total Pendapatan		4.789.000	2.957.000 62.00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 mengalami Peningkatan yaitu sebesar Rp1.255.000,- atau peningkatan mencapai sebesar 73,737% dibandingkan Per 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan adanya Penurunan Jumlah Pendapatan Uang meja (Leges) sebesar (Rp170.000,-) yang semula Rp260.000,- menjadi Rp90.000,-; Kenaikan Jumlah Pendapatan Ongkos Perkara (425233) sebesar Rp140.000,- yang semula Rp390.000,- menjadi Rp530.000,- dan adanya Kenaikan Jumlah Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239) sebesar Rp1.285.000,- yang semula 1.502.000,- menjadi Rp2.337.000,-.

Perbandingan realisasi PNBPer 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7. Perbandingan Realisasi PNBPer 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan (425231)	0	0	0	0.00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	90.000	260.000	(170.000)	(65.38)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	530.000	390.000	140.000	35.90
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	2.337.000	1.052.000	1.285.000	122.15
Total Pendapatan		2.957.000	1.702.000	1.255.000	73.737

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara:
Rp53.128.000,-

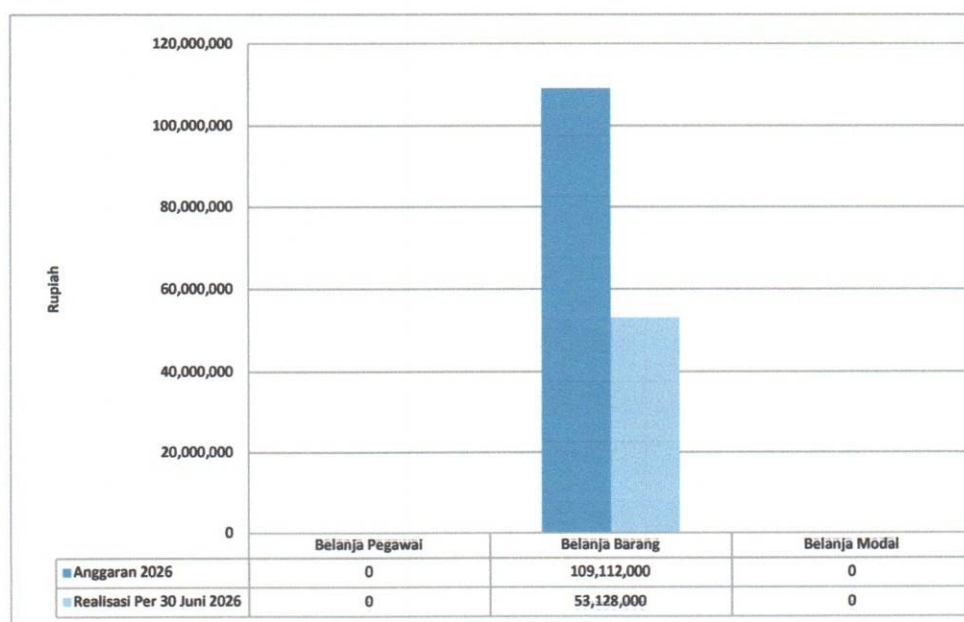
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Mentok Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp53.128.000,- dan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar 50.945.770,-

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	109.112.000	53.128.000	49
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	109.112.000	53.128.000	49
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	109.112.000	53.128.000	49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Per 31 Desember 2024

Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni 2026 sebesar Rp53.128.000,- atau mencapai sebesar 49.00% dari total anggaran 2026 sedangkan Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni 2026 sebesar Rp50.945.770,-. Terjadi Kenaikan Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni 2026 sebesar Rp2.182.230,- atau Kenaikan mencapai sebesar 4,28% dari Realisasi Belanja Negara 30 Juni 2025. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan Beban Barang dan Jasa yaitu Beban Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat, Beban Bahan dan Beban Jasa Konsultan pada Pengadilan Negeri Mentok pada periode semester I TA 2026.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Realisasi di atas (bawah) anggaran	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	53.128.000	50.945.770	2.182.230	4.28
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	53.128.000	50.945.770	2.182.230	4.28

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai:
Rp0,-

Tidak ada Realisasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri Mentok untuk DIPA 03 (402021) Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok	0	0	0	0
PNS				
Belanja Pembulatan	0	0	0	0
Gaji PNS				
Belanja Tunj.	0	0	0	0
Suami/Istri PNS				
Belanja Tunj. Anak	0	0	0	0
PNS				
Belanja Tunj.	0	0	0	0
Struktural PNS				

Belanja Tunj.	0	0	0	0
Fungsional PNS				
Belanja Tunj. PPh	0	0	0	0
PNS				
Belanja Tunj. Beras	0	0	0	0
PNS				
Belanja Uang Makan	0	0	0	0
PNS				
Belanja Tunjangan	0	0	0	0
Umum PNS				
Belanja Tunjangan	0	0	0	0
Kemahalan Hakim				
Belanja Tunjangan	0	0	0	0
Hakim Ad Hoc				
Belanja Uang	0	0	0	0
Lembur				
Total Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian	(0)	(0)	(0)	(0)
Belanja				
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang:
Rp53.128.000,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Mentok Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp53.128.000,- dan Rp50.945.770,-.

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 mengalami Kenaikan sebesar Rp2.182.230,- atau sebesar 4,28% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Beban Barang dan Jasa yaitu Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Beban Bahan, Beban Barang Persediaan Konsumsi, Beban Jasa Konsultan dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Pengadilan Negeri Mentok pada periode semester I TA 2026.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Beban Pengiriman	2,467,000	3,794,000	(1.327.000)	(34.98)
Surat Dinas Pos Pusat				
Beban Bahan	16,800,000	15,130,000	1.670.000	11.04
Beban Persediaan	13,543,000	19,917,000	(6.374.000)	32.00
Konsumsi				

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	375.000	750.000	375.000	(50.00)
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Beban Jasa Konsultan	19,943,000	11,354,770	8.588.230	75.64
Total Belanja Bruto	53.128.000	50.945.770	2.182.230	4.28
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Belanja Netto	53.128.000	50.945.770	2.182.230	4.28

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Netto: Rp0,-

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Mentok (402021) 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp0,-

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Mentok (402021) Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0
Pendukung SIPP				
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0
Alat Pengolah Data Pendukung E-Court	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp0,-

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Mentok (402021) Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan: Rp0,-

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Mentok (402021) Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 16. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp187.317.220,-

Nilai Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp187.317.220,- dan sebesar Rp5.070.000,- atau mencapai Peningkatan sebesar Rp182.247.220,- atau mencapai Peningkatan sebesar 3.594,62% dari realisasi aset lancar per 30 Juni 2025. Peningkatan ini disebabkan adanya Peningkatan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.000.000,-; Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp177.984.220,-; dan Nilai Persediaan sebesar Rp3.737.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Mentok 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17. Rincian Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	177.984.220	0

Piutang Bukan Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	0
Persediaan	1.333.000	5.070.000
Persediaan yang Belum Diregister	0	0
Total Aset Lancar	187.317.220	5.070.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp8.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.000.000,- dan Rp0,-. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran			
•	Saldo Di Rekening Bendahara Pengeluaran	0	0
•	Uang Tunai Di Brankas Bendahara Pengeluaran	8.0000.000	0
•	Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	0	0
•	Selisih	0	0
Jumlah		8.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp,- yang berasal dari saldo pada Bank BRI KCP Mentok dengan Nomor Rekening 654444020211000 atas nama BPG 015 PN MENTOK 402021 sebesar Rp0,-; uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.000.000,-; dan kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan yaitu sebesar Rp0,-.

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp1.333.000,-

Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp1.333.000,- dan Rp5.070.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Barang Konsumsi	1.333.000	5.070.000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Total		1.333.000	5.070.000

Barang persediaan sampai dengan akhir pelaporan Per 30 Juni 2026 berada dalam kondisi baik dan cukup sesuai Berita Acara Hasil Stock Opname Fisik Persediaan DIPA 03 (402021) Nomor: 294/SEK.PN.W7-U5/PL.1.2.5/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.

C.1.3. Persediaan Belum Diregister

*Persediaan Belum
Diregister:
Rp0,-*

Persediaan Belum Diregister Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Persediaan Belum Diregister Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Persediaan Belum Diregister 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Persediaan Belum Diregister	0	0
Total	0	0

Persediaan Belum Diregister merupakan barang yang termasuk persediaan yang sudah dibeli dan sudah dilakukan pencatatan pada aplikasi persediaan, namun belum dicatat pada aplikasi SAKTI karena belum ada nomor SP2D, hal ini dikarenakan belum dilakukan penggantian uang persediaan oleh bendahara pengeluaran.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:
Rp0,-*

Nilai Aset Tetap Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Kenaikan dan Penurunan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(0)	(0)	(0)
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tidak ada Nilai Aset Tetap berupa Tanah Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar 0,- dan Rp0,-.

Tanah:
Rp0,-

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	-	-	-	-	-	-
						Jumlah
						0
Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:						
						Saldo Per 31 Desember 2025
						0
						Mutasi Tambah
						0
						Mutasi Kurang
						(0)
						Saldo Per 30 Juni 2026
						0
						Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026
						(0)
						Nilai Buku Per 30 Juni 2026
						0

Nilai perolehan aset tetap tanah Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,-.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Peralatan dan
Mesin:
Rp0,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	
Peralatan dan mesin	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	(0)

Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan: Rp0,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Mutasi Kurang	(0)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan: Rp0,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan Per 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Mutasi Kurang	(0)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	0

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Aset Tetap Lainnya	0
Mutasi Kurang	(0)
Aset Tetap Lainnya	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap :
Rp0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0	(0)	0
2	Peralatan dan Mesin	0	(0)	0
3	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	(0)	0
4	Gedung dan Bangunan	0	(0)	0
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(0)	0
6	Aset Tetap Lainnya (Tanah)	0	(0)	0
	Jumlah	0	(0)	0

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya :
Rp0,-

Nilai Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Aset Lainnya merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Mentok serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 24. Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1.	Aset Tidak Berwujud	0	0
2.	Aset Lain-Lain	0	0
	Nilai Perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
	Nilai Buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud : Rp0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap aset tak berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Aset Tak Berwujud	0
Mutasi Kurang	(0)
Aset Tak Berwujud	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2026 tidak ada perubahan kenaikan dan penurunan yang berasal dari pembelian, hibah, transfer masuk/transfer keluar, reklasifikasi masuk/reklasifikasi keluar atas aset lainnya berupa aset tak berwujud.

C.3.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain: Rp0,-

Saldo Aset Lain-Lain Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Mentok serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel di bawah:

Saldo Per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya:
Rp0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp0,-) dan (Rp0,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek:
Rp185.984.220,-

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni 2026 dan Per 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp185,984.220,- dan Rp0,-. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp177.984.220,- dan uang muka dari KPPN sebesar Rp8.000.000,-. Nilai Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Mentok Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 26. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	177.984.220	0
Uang Muka Dari KPPN	8.000.000	0
Jumlah	185.984.220	0

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga:
Rp0,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp177.984.220,- dan Rp0,-. Nilai sebesar Rp177.984.220,- merupakan saldo RPL Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar. Saldo ini terdiri dari biaya perkara sebesar Rp3.125.500,- dan biaya konsinyasi sebesar Rp174.858.720,-. Utang kepada pihak ketiga adalah utang yang harus diselesaikan

kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua Belas) bulan sejak tanggal Pelaporan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Mentok Per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	30 Juni 2026
1.	Utang Pihak Ketiga	177.984.220
Jumlah		0

C.5. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp8.000.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.000.000,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp1.333.000,-*

Ekuitas Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.333.000,- dan Rp5.070.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per Tanggal 30 Juni 2026 ada penurunan nilai Ekuitas sebesar (Rp3.737.000,-) atau penurunan sebesar (73,71%) dibandingkan nilai Ekuitas Per Tanggal 30 Juni 2026.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB:
Rp2.957.000,-*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.957.000,- dan Rp1.702.000,- atau terjadinya peningkatan Jumlah Pendapatan PNPB sebesar Rp1.255.000,- atau peningkatan sebesar 73.737%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 28. Rincian Realisasi PNPB Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	%
-----	--------	--------------	--------------	---

1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan (425231)	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	90.000	260.000	(65.38)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	530.000	390.000	35.90
4.	Pendapatan Kejaksaan dan peradilan Lainnya (425239)	2.337.000	1.052.000	122.15
Total Pendapatan		2.957.000	1.702.000	73.737

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai:
Rp0,-*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 29. Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik/(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0

Beban Tunjangan	0	0	0	0
Kemahalan Hakim				
Beban Tunjangan Hakim	0	0	0	0
Ad Hoc				
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan:
Rp18.570.046,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp18.570.046,- dan Rp26.347.596,- atau terjadinya Penurunan Beban Persediaan sebesar (Rp7.777.550,-) atau Penurunan sebesar (29,519%). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan	18.570.046	26.347.596	(7.777.550)	(29.519)
Total Beban Persediaan	18.570.046	26.347.596	(7.777.550)	(29.519)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa:
Rp39.210.000,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp39.210.000,- dan Rp30.278.770,- atau terjadinya kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.931.230,- atau Kenaikan sebesar 29,497%. Beban Barang dan Jasa Terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
--------	--------------	--------------	--------------	---

Beban Pengiriman Surat Dinas				
Pos Pusat	2.467.000	3.794.000	1.327.000	(34.98)
Beban Bahan	16,800,000.00	15,130,000.00	1.670.000	11.40
Beban Jasa Konsultan	19,943,000	11,354,770	8.588.230	75.64
Total Beban Barang dan Jasa	39.210.000	30.278.770	8.931.230	29.497

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 0,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik/(Turun)	%
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penanganan Pandemi COVID 19	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan				
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan				
Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas: Rp375.000,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp375.000,- dan Rp750.000,- atau terjadinya penurunan jumlah Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp375.000,-) atau penurunan sebesar (50,00%).

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik/(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	375.000	750.000	(375.000)	(50,00)
Dalam Kota				
Total Beban Perjalanan Dinas	375.000	750.000	(375.000)	(50,00)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi:
Rp0,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik/(Turun)	%
Beban Penyusutan	(0)	(0)	(0)	(0)
Peralatan dan Mesin				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	(0)	(0)	(0)	(0)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih:
Rp0,-

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan	0	0	0	0
Piutang Lainnya				
Total Beban	0	0	0	0

D.9. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

*Surplus/(Defisit)
Dari Kegiatan
Operasional:
(Rp55.198.046,-)*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2026 sebesar (Rp55.198.046,-) berasal dari Jumlah Pendapatan Rp2.957.000 ditambah beban sebesar Rp(58.155.046,-), Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,- sehingga Jumlah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Per 30 Juni 2026 sebesar (Rp55.198.046,-). Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/(Turun)	%
Surplus /(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(55.198.046)	(55.674.366)	476.320	0.856
Surplus /(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan	0	0	0	0
Non Operasional Lainnya				
Total Surplus/(Defisit) Sebelum	(55.198.046)	(55.674.366)	(476.320)	(0.856)
Pos Luar Biasa				

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Rp5.070.000,- Nilai Ekuitas Awal pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.070.000,- dan Rp4.602.000,- atau terjadinya kenaikan sebesar Rp468.000,- atau kenaikan mencapai sebesar 10,17%.

E.2. Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO: (Rp55.198.046,-) Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp55.198.046,-) dan (Rp55.674.366,-) atau terjadinya Penurunan Jumlah Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp476.320,- atau penurunan Jumlah Surplus/(Defisit)-LO sebesar 0,86%. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih lebih/kurang antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset: Rp0,- Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan: Rp0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp0,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang bukan karena revaluasi nilai.

E.6. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas:
Rp51.461.046,-*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp51.461.046,- dan Rp52.451.366,- atau terjadinya penurunan jumlah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp990.320,-) atau Penurunan sebesar (1,89%). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BU. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas
Per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	2.957.000
Ditagikan Ke Entitas Lain	53.128.000
Pengesahan Hibah Langsung	0
Transfer Masuk	0
Jumlah	51.461.046

(ada di neraca

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir:
Rp1.333.000,-*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.333.000,- dan Rp1.379.000,- atau terjadinya Penurunan

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar (Rp46.000,-) atau Penurunan Jumlah Ekuitas Akhir sebesar (3,34%).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Selama periode 30 Juni 2026 tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Selama Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 belum ada pemeriksaan dari BPK untuk Pengadilan Negeri Mentok.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Periode 30 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Mentok.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Mentok adalah menggunakan rekening virtual dengan Nomor Rekening: 654444020211000 a.n. BPG 015 PN MENTOK 402021 pada BRI KCP Mentok yang digunakan untuk menampung dana keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN DIPA 03 (402021) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Mentok dengan saldo Bank Per Tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp0,-. Rekening ini sudah mendapat persetujuan dari KPPN Pangkalpinang dengan Surat Persetujuan Nomor S-153/WPB.12/KP.06/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dan berstatus TNP.

F.2.4. Revisi DIPA

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Mentok telah melakukan 2 (Dua) kali revisi DIPA yaitu:

1. Revisi ke-01 tanggal 24 Desember 2025, revisi tentang Pemuktahiran data POK serta Perbaikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA yang telah disesuaikan

dengan Realisasi Bulan Januari 2026 s.d Februari 2026 dan rencana penarikan dana Bulan Maret 2026 s.d Bulan Juni 2026.

2. Revisi ke-02 tanggal 13 Februari 2026, revisi tentang Pemuktahiran data POK serta Perbaikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA yang telah disesuaikan dengan Realisasi Bulan Februari 2026 s.d Maret 2026 dan rencana penarikan dana Bulan Maret 2026 s.d Bulan Juni 2026.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2026 tidak ada ralat SPM, SSBP dan SSPB yang dilakukan oleh satker Pengadilan Negeri Mentok (402021).

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pengadilan Negeri Mentok memiliki rekening lainnya berupa rekening virtual dengan Nomor Rekening: 2090-01-000230-30-1 a.n. RPL 015 PDT PN MENTOK BIAYA PERKARA pada BRI KCP Mentok yang digunakan untuk menampung dana penerimaan negara bukan pajak berupa biaya proses/perkara DIPA 03 (402021) yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Mentok dengan saldo Bank Per Tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp177.984.220,-, yaitu migrasi saldo awal rekening penerimaan lainnya dari Kas Bendahara Penerimaan berupa Dana Titipan Pihak Ketiga. Rekening ini sudah mendapat persetujuan dari KPPN Pangkalpinang dengan Surat Persetujuan Nomor S-107/WPB.10/KP.0104/2019 Tanggal 15 Januari 2019 dan berstatus TNP.

Data Keuangan Perkara Pengadilan Negeri Mentok (402021) Per 30 Juni 2026 terdiri dari Biaya Perkara sebesar Rp3.181.000,- (Rincian Saldo di Bank sebesar Rp3.125.500,- dan Saldo Kas Tunai di Brankas sebesar Rp55.500,-); Biaya Eksekusi sebesar Rp0,-; Biaya Konsinyasi berupa titipan pihak ketiga berupa saldo bank sebesar Rp174.858.720,- dan Biaya Lain-Lain sebesar Rp0,- sehingga Total Biaya Proses/Perkara secara keseluruhan sebesar Rp178.039.720,-.

Dengan rincian saldo Bank rekening virtual dengan Nomor Rekening: 2090-01-000230-30-1 a.n. RPL 015 PDT PN MENTOK BIAYA PERKARA pada BRI KCP Mentok sebesar Rp177.984.220,- yang terdiri dari Biaya Perkara Sebesar Rp3.125.500,- dan Biaya Konsinyasi sebesar Rp174.858.720,- dan Saldo Kas Tunai di Brankas sebesar Rp55.500,- dengan jumlah perkara sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) perkara.

Pada Akhir Tahun 2025, sesuai Surat Keputusan Sekretaris MA RI selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang MA RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya (Pengadilan Negeri Mentok). Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk pejabat pengelola keuangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Mentok Nomor 664/SEK.PN.W7-U5/KU1.1.1/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan Untuk DIPA 03 (402021) pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun Anggaran 2026. Berikut ini Daftar Nama Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Negeri Mentok Satker 402021:

1. Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen: **Sevia Dwi Krisnawaty, S.Akt., M.M.**;
2. Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (PPSPM): **Budiyanto, S.H.**
3. Staf Pengelola Keuangan (Operator Gaji Web Terpusat): **Moch. Romadhon, S.H.**;
dan
4. Staf Pengelola Keuangan (Operator GLP): **Rafdi Oktario, S.T.**

Sekretaris juga telah menunjuk pejabat pengelola keuangan untuk melaksanakan tugas perbendaharaan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Mentok Nomor 676/SEK.PN.W7-U5/KU1.1.1/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Untuk DIPA 03 (402021) pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun Anggaran 2026. Berikut ini Daftar Nama Pejabat Perbendaharaan di Pengadilan Negeri Mentok Satker 402021:

1. Bendahara Pengeluaran: **Risnauli Landongna Sinamo, A.Md.**; dan
2. Bendahara Penerimaan: **Hanna Riana Purba, A.Md.**

*RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	
Peralatan dan mesin	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	(0)

Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan: Rp0,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Mutasi Kurang	(0)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(0)
Saldo Per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan: Rp.0,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan Per 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Pengadilan Negeri Mentok (402021)
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026
(TERLAMPIR)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,957,000	1,702,000	1,255,000	73.737
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,957,000	1,702,000	1,255,000	73.737
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,957,000	1,702,000	1,255,000	73.737
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	18,570,046	26,347,596	(7,777,550)	(29.519)
Beban Barang dan Jasa	39,210,000	30,278,770	8,931,230	29.497
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	375,000	750,000	(375,000)	(50)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
 Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	58,155,046	57,376,366	778,680	1.357
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(55,198,046)	(55,674,366)	476,320	(0.856)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(55,198,046)	(55,674,366)	476,320	(0.856)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(55,198,046)	(55,674,366)	476,320	(0.856)

Keterangan :

FINAL



Mentok, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SEVIA DWI KRISNAWATY
NIP. 198509252009042005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	53,128,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,957,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	90,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	530,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	2,337,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,467,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	16,800,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,543,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	19,943,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0
JUMLAH			56,085,000	56,085,000

Keterangan :

FINAL

Mentok, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



SEVIA DWI KRISNAWATY

198509252009042005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	8,000,000	0	8,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	177,984,220	0	177,984,220	0.00
Persediaan	1,333,000	5,070,000	(3,737,000)	(73.71)
JUMLAH ASET LANCAR	187,317,220	5,070,000	182,247,220	3,594.62
JUMLAH ASET	187,317,220	5,070,000	182,247,220	3,594.62
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	177,984,220	0	177,984,220	0.00
Uang Muka dari KPPN	8,000,000	0	8,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	185,984,220	0	185,984,220	
JUMLAH KEWAJIBAN	185,984,220	0	185,984,220	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,333,000	5,070,000	(3,737,000)	(73.71)
JUMLAH EKUITAS	1,333,000	5,070,000	(3,737,000)	(73.71)
JUMLAH EKUITAS	1,333,000	5,070,000	(3,737,000)	(73.71)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	187,317,220	5,070,000	182,247,220	3,594.62

Keterangan :
FINAL

Mentok, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KEA

SEVIA DWI KRISNAWATY
NIP. 198509252009042005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MENTOK 402021

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,789,000	2,957,000	(1,832,000)	62	14,812,000	1,702,000	13,110,000	11
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,789,000	2,957,000	(1,832,000)	62	14,812,000	1,702,000	13,110,000	11
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	4,789,000	2,957,000	(1,832,000)	62	14,812,000	1,702,000	13,110,000	11
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	109,112,000	53,128,000	(55,984,000)	49	101,882,000	50,945,770	50,936,230	50
1. Belanja Pegawai								
2. Belanja Barang								
3. Belanja Modal								
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang								
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								
1. Dana Bagi Hasil								

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MENTOK 402021

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	109,112,000	53,128,000	(55,984,000)	49	101,882,000	50,945,770	50,936,230	50
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 9:34 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,070,000	4,602,000	468,000	10.17
SURPLUS/DEFISIT-LO	(55,198,046)	(55,674,366)	476,320	(0.86)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	51,461,046	52,451,366	(990,320)	(1.89)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,737,000)	(3,223,000)	(514,000)	15.95
EKUITAS AKHIR	1,333,000	1,379,000	(46,000)	(3.34)

Keterangan :

FINAL

Mentok, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SEVIA DWI KRISNAWATY
NIP. 198509252009042005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402021) PENGADILAN NEGERI MENTOK

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	180,626,720	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,379,000	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	180,626,720
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	8,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	50,945,770
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,702,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,207,596
0.0	391111	Ekuitas	0	4,602,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	260,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	390,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,052,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,794,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,130,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	11,354,770	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	26,347,596	0
JUMLAH			249,084,086	249,084,086

Keterangan :

FINAL

Mentok, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

SEVIA DWI KRISNAWATY

NIP. 198509252009042005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 402021

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 27/07/26 1:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	480,000	90,000	0	90,000	18.75
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	920,000	530,000	0	530,000	57.61
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3,389,000	2,337,000	0	2,337,000	68.96
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	61.75
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	61.75
	JUMLAH PENDAPATAN	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	61.75

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 402021

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 27/07/26 1:32 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	470,000	260,000	0	260,000	55.32
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,655,000	390,000	0	390,000	23.56
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	12,687,000	1,052,000	0	1,052,000	8.29
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		1,702,000	0	1,702,000	11.49
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	14,812,000	1,702,000	0	1,702,000	11.49
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	14,812,000	1,702,000	0	1,702,000	11.49
	JUMLAH PENDAPATAN	14,812,000	1,702,000	0	1,702,000	11.49

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 402021
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 2:21 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 27/7/26 12:56 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,175,000	14,662,000	2,467,000	0	2,467,000	16.83	12,195,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,175,000	14,662,000	2,467,000	0	2,467,000	16.83	12,195,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	25,585,000	21,220,000	16,800,000	0	16,800,000	79.17	4,420,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	25,585,000	21,220,000	16,800,000	0	16,800,000	79.17	4,420,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,600,000	24,480,000	13,543,000	0	13,543,000	55.32	10,937,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	30,600,000	24,480,000	13,543,000	0	13,543,000	55.32	10,937,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultansi	48,000,000	48,000,000	19,943,000	0	19,943,000	41.55	28,057,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	48,000,000	48,000,000	19,943,000	0	19,943,000	41.55	28,057,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,500,000	750,000	375,000	0	375,000	50	375,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	750,000	375,000	0	375,000	50	375,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
	JUMLAH BELANJA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 402021
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 2:20 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/5/26 7:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,600,000	10,225,000	3,794,000	0	3,794,000	37.11	6,431,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	15,600,000	10,225,000	3,794,000	0	3,794,000	37.11	6,431,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	26,162,000	24,220,000	15,130,000	0	15,130,000	62.47	9,090,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	26,162,000	24,220,000	15,130,000	0	15,130,000	62.47	9,090,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,620,000	37,937,000	19,917,000	0	19,917,000	52.5	18,020,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	30,620,000	37,937,000	19,917,000	0	19,917,000	52.5	18,020,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	28,000,000	11,354,770	0	11,354,770	40.55	16,645,230
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,000,000	28,000,000	11,354,770	0	11,354,770	40.55	16,645,230
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	1,500,000	750,000	0	750,000	50	750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,500,000	1,500,000	750,000	0	750,000	50	750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 52	101,882,000	101,882,000	50,945,770	0	50,945,770	50	50,936,230
	JUMLAH BELANJA	101,882,000	101,882,000	50,945,770	0	50,945,770	50	50,936,230